

**Caring for Peace and Conducting MoU Results in Aceh
(Study of Southeast Aceh Society Perceptions)**

**Merawat Perdamaian Dan Menjalankan Hasil Mou Di Aceh
(Studi Persepsi Masyarakat Aceh Tenggara)**

Oleh

**Mustapa Kamil Alga Beruh. S.sos., MA
Lusiana.SE.,M.Si**

UNIVERSITAS GUNUNG LEUSER ACEH

mustapakamilbroeh@gmail.com

ABSTRACT

A lot of the questions that form the basis of this writing are the result of the author's own observations in the field where the author himself felt there was a weakness that required the author to analyze it with various approaches, both historical approaches and so on. The conflict in Aceh is an inhuman crime because it is judged by many events that are indeed designed by the government of both the local government and the central government that has an interest in the land of Aceh, with the utopian political pretext known as the independence of the Aceh people. This is a great foolishness committed by the rule against the Aceh community itself, if the government should be grateful for the peace that is enshrined in the MoU between the Indonesian government and the Aceh Free Movement, but with that little is able to restore the conditions of the Aceh people to feel democracy. However, from the outcome of the conflict in Aceh during this time many parties have actually exploited the situation in order to gain personal gain, then through this writing the author hopes there is a spark of hope that can give peace and reveal who is actually behind the violent events in Aceh, but who is benefited from the results of the peace has not been able to reveal the reality that the society of Aceh is happening under such conditions, because in the value of the MoU is born which society is being represented for such peace and also what their motivations are joined in the movement of Aceh Merdeka or GAM.

Keywords: Peace, Conflict, MoU, Aceh,

ABSTRAK

Banyaknya pertanyaan yang menjadi dasar tulisan ini merupakan hasil dari pengamatan penulis sendiri di lapangan dimana penulis sendiri merasakan ada keganjilan yang mengharuskan penulis untuk menganalisisnya dengan berbagai pendekatan, baik pendekatan historis dan lain sebagainya. Konflik di Aceh merupakan sebuah kejahatan yang tidak berperikemanusiaan karena dinilai banyak peristiwa yang memang di design

oleh pemerintah baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang mempunyai kepentingan terhadap tanah Aceh, dengan dalih politik utopia yang dikenal dengan kemerdekaan masyarakat Aceh. Ini merupakan sebuah kebodohan besar yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Aceh sendiri, seyogianya pemerintah harus bersyukur dengan adanya perdamaian yang tertuang dalam MoU antara pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, namun dengan hal tersebut sedikit mampu memulihkan kondisi masyarakat Aceh untuk merasakan demokrasi. Namun dari hasil konflik di Aceh selama ini banyak pihak yang memang memanfaatkan situasi tersebut demi mendapatkan keuntungan pribadi, maka melalui tulisan ini penulis sendiri berharap ada se percik harapan yang mampu memberikan perdamaian dan mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa kekerasan di Aceh, namun siapa yang diuntungkan dari hasil perdamaian tersebut belum ada yang mampu untuk mengungkapkan realitas yang terjadi masyarakat Aceh dengan kondisi yang seperti ini, karena di nilai dari MoU tersebut lahir masyarakat manakah yang sedang di wakikan untuk perdamaian tersebut dan juga apa motivasi mereka yang tergabung dalam gerakan separatisme Aceh Merdeka tersebut atau GAM.

Keywords: Perdamaian, Konflik, MOU, Aceh,

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini sebagai alat waspada dalam keterkutukan masa lalu dan sebagai pengingat dalam perjalanan sejarah, Karl Marx dalam tulisan *Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*. Selalu berulang kali menyatakan yaitu, pertama sebagai *tragedy*, selanjutnya menjadi lelucon. Begitu juga Sang revolusioner Hasan Tiro tersebut tergiang-tergiang dengan slogan di atas begitu juga di atas pintu gerbang yang terdapat di museum kamp konsentrasi Nazi di Dachau Jerman. “*siapa yang melupakan sejarah masa lalu akan cenderung untuk mengulangi sejarah*” oleh Filsuf Jerman Arthur Schopenhauer 1788-1860. Begitu juga dengan Abraham Lincoln yakni *one cannot as cape history* yaitu orang tidak dapat melupakan sejarah. begitu juga, bukan berarti sejarah sebagai semangat moral dalam memacu gairah untuk membangun konflik bagi manusia, banyak di jaman millennial ini kita lihat bahwa sejarah sebagai doktrin dari sebuah semangat perjuangan yang salah. Tentunya, hal ini sangat kita sayangkan dalam masa lalu. Namun banyak juga yang salah menginterpretasikan makna dari perjuangan dalam mempelajari sejarah yang begitu berdambah kepada pemikiran yang ekstrimpisme, tentunya hal ini sudah menjadi rahasia umum di publik, dan juga tidak jarang kita ketemukan di berbagai golongan dan paham dari masyarakat Indonesia, seperti yang di sampaikan oleh, H. M. Amin Abdullah, konflik adalah *min lawazim al hayah*.¹

¹ Murizal Hamzah, *Hasan Tiro Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*, (Banda Aceh:Bandar Publishing, 2005)

B. Aceh Hingga Kekerasan yang Menciderai Rasa Kemanusiaan

Dalam sejarah kehidupan umat manusia hampir tidak pernah melewati era yang di lalui nya tanpa *konflik*. Dalam era apapun, dimana pun, dan kapan pun manusia tidak pernah terbebas dari konflik, pertengkaran, dan perselisihan. Begitu juga konflik juga bisa dalam skala pribadi, keluarga, maupun lembaga. Belum lagi konflik antar etnis, antar ras, suku, agama, dan juga negara. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi konflik tersebut. Ilmu pengetahuan adalah satu-satunya untuk meminimalisir konflik tersebut. Tapi lebih dominan akar dari komplik tersebut perbedaan. Perbedaan ras, etnis, kulit, kelas, ekonomi, bahasa, budaya, agama, pengetahuan, tingkat penguasaan iptek, gender, umur merupakan wilayah yang sangat subur sebagai cikal bakal dan sekaligus sebagai tempat subur untuk persemaian konflik tersebut. Perbedaan itu sendiri ada secara alami karena terbentuk oleh *keyakinan, belief, pandangan hidup* atau *world view*. Keyakinan dan belief, lebih-lebih yang dogmatis-ideologis, di bentuk oleh dari kepentingan-kepentingan politik dan sekelompok orang untuk mempertahankan diri atau kelompok (*survival for the fittest*). Dengan demikian konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial. Entitas kehidupan sosial memang memerlukannya. Dalam pepatah Arab di sebut bahwa konflik adalah *min lawazim al-bayah* atau keniscayaan hidup. Ini adagium pertama yang perlu dicamkan oleh siapa pun. Mustahil orang menghindari dari konflik. Meskipun konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, tapi manusia tak akan bertahan hidup dalam pertentangan dan perselisihan terus menerus. Hanya mengekalkan konflik, tanpa juang memprioritaskan perdamaian hidup antar sesama, semua menentang hukum alam. Karena di dalam alam semesta ada dialektika yang terus menerus antara keteraturan (*cosmos*) dan tidak beraturan (*chaos*). Kehidupan tumbuh-tumbuhan dapat berlanjut, jika alam secara stabil dapat menyediakan air secara teratur misalnya. Namun sesekali juga ada masa kekeringan, ketersediaan air menyerut yang mengakibatkan gagal panen dan tumbuh-tumbuhan yang lain merosot hasilnya (*chaos*). Chaos atau musibah di suatu tempat belum tentu terjadi di tempat lain. Lalu terjadi *Equilibrium* dalam alam semesta dalam alam semesta dalam skala makro. Banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, adalah bagian dari *chaos*. Namun begitu terjadi chaos, manusia berharap dan merindukan kembali berfungsinya kembali *cosmos* semula. Demikianlah terjadi perputaran *sunatullah*. Demikian juga manusia mau tidak mau harus menerima irama tersebut. Artinya ada chaos dan seperti ada cosmos. Begitu juga sebaliknya, ada cosmos ada chaos. Inilah ritme kehidupan pada dasarnya, jika di tarik ke dalam kehidupan manusia, maka konflik (*chaos*) dan damai (*cosmos*) adalah ibarat siang dan malam yang saling silih berganti.²

C. Peran Penting Menrawat Perdamaian Aceh dan MoU Helsinki

Persoalan ini sangat signifikan dengan zaman kontemporer ini, begitu juga di masyarakat Indonesia yang kita hadapi adalah penentuan dimana peran yang sepatutnya dimainkan negara dalam kehidupan yang penuh konflik ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah,

² Benedict Anderson, *Imagined Communities*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

1. Apakah negara sudah menjadikan perannya sebagai alat yang ampuh untuk melerai konflik? (Negara sebagai *Problem Solver*),
2. apakah justru negara sebagai pemicu konflik laten? Yang sampai saat ini tidak ada habis-habisnya antara manusia (negara sebagai *a part of the problem*) atau (negara sebagai *a trouble maker*).

Tentunya kita tidak menginginkan konflik tersebut sebagai Insan yang pencinta damai, dan saya yakin setiap kita sama. Tidak menginginkan konflik tersebut. Karena konflik hanya memberikan tindakan yang tidak sesuai norma-norma kemanusiaan sebagai makhluk cinta damai di muka bumi ini. Secara umum, *Agama* juga tidak pernah mengajarkan kekerasan karena adanya agama adalah tentunya mengajarkan nilai-nilai kebaikan antara sesama makhluk sosial dan se isi bumi ciptaan *Allah Swt*. Namun menjadi pertanyaannya adalah,

1. apakah agama menjadi solusi dalam penyelesaian konflik, dan dimana peran agama dalam melerai konflik tersebut?

Karena di dalam agama tentunya mempunyai pemimpin dalam panutan jamaahnya atau pengikutnya, seperti agama *Islam*, *rah matan lila alamin*, *amal makruf nabi munkar*, tentunya mempunyai Imam dalam menjalankan ritual ibadah *Solat*. Secara otomatis segala sesuatu secara khittahnya dalam menjalankan ritual ibadah atau *Solat* tersebut di serahkan kepada imam. Begitu di yakini pemimpin dalam menjalankan ritual ibadah *solat* tersebut. Namun apakah sepenuhnya solusi dari persoalan yang ada dalam *solat* tersebut bisa di selesaikan oleh imam? Tentunya jawabannya Tidak, karena *islam* mempunyai *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* sebagai hukum dalam menjalankan *syariatnya*, maka harus di kembalikan lagi kepada konstitusi dan hukumnya yaitu, *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah Hadis Nabi Mubammad Saw*. Begitu juga kita sebagai masyarakat bernegara, tentunya mempunyai konstitusi dalam bernegara. Indonesia sendiri sebagai negara hukum, tentunya hukum sebagai konstitusi dalam landasan menjalankan negara tersebut. Dan jika konflik terjadi apakah konstitusi sudah mengatur sepenuhnya dalam melerai konflik tersebut? Seperti kasus beberapa dekade Aceh berdarah, di Aceh sendiri dalam dekade Aceh konflik yang begitu merugikan masyarakat Indonesia dan Aceh khususnya, sangat menyayat hati dalam peristiwa konflik besar ini. Sebagai makhluk sosial tentunya kita mendekati kasus ini sebagai kasus Asusila dalam Hak Asasi Manusia, hal ini sangat sering terjadi di negeri hukum ini. Seperti kasus di balik kematian Munir, Marsinah, begitu juga dengan Edi Tansil yang lenyap seolah-olah telan Bumi dalam kasus pelariannya. Namun bagi konspirasi meyakinkan bahwa mereka yang menganggap ini adalah sebuah pola permainan oknum dalam memonopoli kasus dalam kepentingan pribadi atau kelompok lembaga yang mempunyai kepentingan dalam hal tersebut, dan tidak jarang juga demi kepentingan para penguasa dan elit demi eksistensinya. Kenapa tidak, hal ini bisa terjadi bila dapat menguntungkan bagi para penguasa dan *stake holder*.³ Namun secara pandangan ilmu pengetahuan *sosial science* ilmu sosial. Yaitu hukum kausalitas sebab dan akibat harus di kaji secara eksplisit dan mendalam, sehingga dalam kasus ini. Seperti yang kita ketahui bersama, teori konspirasi muncul sebagai salah satu

³ Abhee Antara, *Teori Konspirasi Peristiwa Kasus Isu Politik di Indonesia dan Dunia*, (Jakarta Selatan, TransMedia, 2013)

cara untuk solusi serpihan dari misteri-misteri dalam sebuah kasus yang tidak ada kejelasan kepada publik. Sebagai hukum kausalitas ilmu pengetahuan sosial, dalam memalarkan logika lompatan rasionalisasi. Namun bagi sebagian lainnya, teori konspirasi di anggap sebagai jalan untuk menemukan kenyataan berdasarkan serpihan fakta yang tercerai berhasi dan di rangkai oleh kreativitas lompatan-lompatan nalar logika juga. Artinya tidak bisa kita pungkiri kasus konflik di Aceh juga kemungkinan adalah hasil dari konspirasi *stake holder* seperti *Elites political regionalist of Aceh* penguasa Aceh sendiri bahkan penulis meyakini ini merupakan infiltrasi dan imperialisme negara lain, seperti halnya kita ketahui negara Swedia, America dan lainnya yang telah berkontribusi dalam peperangan di Aceh, misalnya tentang amunisi, Latihan dan akomodasi peperangan Gerakan Aceh Merdeka.

Di dalam kasus konflik di Aceh ini sama saja halnya seperti sebuah cerita Seorang anak kecil yang baru lahir dari Rahim ibu kandungnya. Anak kecil yang tidak tahu apa yang di lakukan, sama seperti orang buta yang mengeraba Gajah, orang buta dalam persepsinya tentang gajah bisa jadi dia merepresentasikan gajah seperti tembok, kalau saja orang buta tersebut mengerabu perut gajah, namun ada juga orang buta lainnya dalam mengartikulasikan gajah itu luas, dan mempunyai kaki lima, karena si buta tersebut turut mengeraba belalai gajah. Sehingga dia mengasosiasikan itu sebagian dari anggota dari bagian tubuh kaki gajah. Dan mereka bersikeras tentunya dengan argumentasi mereka masing-masing. Nah seperti itu juga dengan anak kecil, pada awal dia lahir ke dunia, tentunya dia tidak tahu apa, bagaimana, siapa, dan dimana yang semestinya dengan kondisi kekosongan pengetahuan sang anak tersebut tentunya ini adalah tugas orang tua untuk memberikan ilmu pengetahuan, seperti bicara, cara berjalan yang benar, cara makan dan minum dan lainnya, sehingga sang anak mengerti apa yang seharusnya dia lakukan dalam menjalani hidup sehari-hari. Tentunya bertujuan untuk menjadikan anaknya normal dan sempurna, karena pada dasarnya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya miskin ilmu pengetahuan, walaupun ilmu sekecil apapun itu yang tentunya bisa memberikan manfaat bagi diri sang anak dan orang lain. Dari apologi di atas tersebut sangat berkesinambungan dengan kondisi negeri kita Indonesia saat ini. Dari kasus konflik di daerah-daerah dan negara belahan menapung. bahkan menurut penulis sendiri, karena keterbatasan ilmu pengetahuan masyarakat Aceh pada saat itu memudahkan para separatisme untuk mengalang simpatisan masyarakat untuk bergabung di Gerakan Aceh Merdeka, juga karena ingin balas dendam dan juga ada karena memang tidak tahu sama sekali apa tujuan mereka asal tergabung aja, supaya tidak di kucilkan di masyarakat, bahkan ada sebagian menjadikan sebagai tameng atau keamanan bagi pribadi supaya tidak di ganggu para anggota TNI dan Polisi yang sedang tugas di Aceh, Semuanya hanya kepentingan semata.

D. Kesimpulan

MoU Helsinki semestinya sudah menjadi regulasi yang mengatur perdamaian yang berkelanjutan di Aceh, konflik yang dimasa lalu Aceh merupakan sebuah pembelajaran penting segala elemen kenegaraan harus di libatkan dalam upaya kesejahteraan masyarakat Aceh Secara berkelanjutan, dalam UUPA tentunya jauh dari kata sempurna, namun kita berharap kepada pemerintah dan pihak legislatif baik di DPRA dan DPRK Aceh senantiasa merawat dan mengedepankan rasa kepedulianya kepada masyarakat Aceh pada umumnya tentunya demi menjaga kedamaian di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Murizal Hamzah, *Hasan Tiro Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*, (Banda Aceh:Bandar Publishing, 2005)
2. Benedict Anderson, *Imagined Communities*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
3. Abhee Antara,*Teori Konspirasi Peristiwa Kasus Isu Politik di Indonesia dan Dunia*, (Jakarta Selatan, TransMedia, 2013)